

EKONOMI POLITIK PERTUMBUHAN 8 PERSEN: AMBISI, RISIKO, DAN JALAN REALISTIS BAGI INDONESIA

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Pertumbuhan 8 persen adalah ambisi besar untuk akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa fondasi kuat, target ini berisiko menimbulkan ketimpangan, instabilitas, dan pemborosan. Diperlukan transformasi struktural, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.

8%
PERTUMBUHAN
MENUJU
INDONESIA EMAS
2045

VISI INDONESIA EMAS 2045

Indonesia menjadi negara maju,
berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan.



KONDISI EKONOMI TERKINI

PERTUMBUHAN EKONOMI 2025	TRIWULAN I-2026 (y-on-y)	INFLASI April 2026	BI RATE Mei 2026
5,11% (y-on-y)	5,61%	1,95% (y-on-y)	5,25%

Stabilitas makro terjaga, namun pertumbuhan masih di kisaran 5%. Diperlukan lompatan kualitas dan kuantitas untuk mencapai 8%.

Sumber: BPS (Mei 2026), Bank Indonesia (Mei 2026)

MENGAPA TARGET 8% PENTING?



- Mempercepat kenaikan pendapatan per kapita dan mengejar status negara maju pada 2045.
- Menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas bagi bonus demografi.
- Memperkuat industrialisasi dan nilai tambah domestik untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
- Mendorong pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat.
- Meningkatkan peran Indonesia dalam ekonomi global.

MESIN PERTUMBUHAN 8%



RISIKO JIKA DICAPAI SECARA KELIRU

- Overheating:** inflasi tinggi, rupiah tertekan, suku bunga naik.
- Risiko fiskal:** defisit dan utang meningkat, ruang fiskal menyempit.
- Proyek tidak produktif:** pemborosan dan aset menganggur (white elephant).
- Pelemahan tata kelola:** korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan.
- Ketimpangan meningkat:** manfaat hanya dinikmati kelompok tertentu.
- Ketergantungan komoditas:** rapuh terhadap gejolak harga global.
- Tekanan pada independensi BI dan lembaga pengawas:** mengurangi kredibilitas ekonomi.

JALAN REALISTIS MENUJU PERTUMBUHAN 8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stabilitas Makroekonomi Jaga inflasi, nilai rupiah, defisit fiskal, dan sistem keuangan tetap sehat.	Investasi Produktif Fokus pada sektor bernilai tambah tinggi, infrastruktur, energi, dan teknologi.	Revitalisasi Manufaktur Perkuat industri pengolahan berorientasi ekspor dan inovasi.	Hilirisasi Berbasis Inovasi Dari bahan mentah ke produk akhir, teknologi, riset, dan rantai pasok dalam negeri.	SDM Unggul & Produktif Reformasi pendidikan, vokasi, kesehatan, reskilling & upskilling tenaga kerja.	UMKM Naik Kelas Digitalisasi, akses pembiayaan, standar kualitas, dan integrasi rantai nilai.	Pendalaman Keuangan Perkuat pasar modal, pembiayaan jangka panjang, dan inklusi keuangan.	Transisi Energi Hijau Kembangkan energi terbarukan, efisiensi, dan ekonomi hijau secara bertahap.	Reformasi Fiskal Perkuat pajak, alihkan subsidi, dan tingkatkan efisiensi belanja.	Pemerataan Wilayah Bangun pusat pertumbuhan baru, konektivitas, dan layanan dasar merata.

EKONOMI POLITIK: SIAPA BERPERAN & KEPENTINGANNYA



Pertumbuhan 8% hanya akan berkelanjutan jika dikelola dengan tata kelola yang baik, transparan, dan inklusif.

INDIKATOR KEBERHASILAN (Bukan Sekadar PDB)

Pertumbuhan PDB berkualitas	Produktivitas Tenaga Kerja	Kontribusi Manufaktur	Eksport produk bernilai tambah	Investasi dalam negeri & luar negeri
Penurunan Kemiskinan	Penurunan Ketimpangan	Rasio Pajak meningkat	Kualitas Pendidikan & Kesehatan	Penurunan Emisi & Kerusakan Lingkungan
Inovasi & Riset meningkat	Pekerjaan Formal Berkualitas	Stabilitas Rupiah & Inflasi Terkendali	Pemerataan Antar Wilayah	Kepercayaan Publik & Tata Kelola Baik

Pertumbuhan 8% bukan tujuan instan, tetapi hasil transformasi struktural yang konsisten, inklusif, hijau, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

“ Ambisi memberi arah, kebijakan memberi jalan, tata kelola memberi kepercayaan, dan rakyat memberi kekuatan. Bersama, kita wujudkan 8% yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. ”



**INDONESIA
EMAS 2045**

*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi Politik Pertumbuhan 8 Persen: Ambisi,
Risiko, dan Jalan Realistis bagi Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

6 Juni 2026

*Sebagai konteks mutakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 tercatat **5,11%**, sementara triwulan I-2026 tumbuh **5,61% yoy** menurut BPS. Pemerintah menargetkan pertumbuhan menuju **8% pada 2029**, dengan kebutuhan investasi yang meningkat tajam; Sekretariat Kabinet mencatat target investasi 2029 sekitar **Rp3.414 triliun** untuk menopang pertumbuhan 8%. Di sisi lain, Bank Indonesia pada Mei 2026 menaikkan BI Rate menjadi **5,25%**, menunjukkan bahwa ambisi pertumbuhan tinggi tetap harus berhadapan dengan stabilitas rupiah, inflasi, dan tekanan global. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))*

EKONOMI POLITIK PERTUMBUHAN 8 PERSEN: AMBISI, RISIKO, DAN JALAN REALISTIS BAGI INDONESIA

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi 8 persen kembali menjadi tema penting dalam wacana pembangunan Indonesia. Target tersebut tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga politis, karena berkaitan dengan legitimasi pemerintahan, harapan publik terhadap kesejahteraan, strategi menuju Indonesia Emas 2045, dan kebutuhan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Artikel ini membahas ekonomi politik pertumbuhan 8 persen

dengan menempatkannya dalam hubungan antara ambisi pembangunan, kapasitas negara, stabilitas makroekonomi, struktur produksi, investasi, produktivitas, tata kelola, dan tekanan global. Pertumbuhan 8 persen bukan hal yang mustahil secara historis, tetapi sangat menuntut perubahan struktural yang besar. Indonesia pernah mengalami pertumbuhan tinggi pada masa tertentu, tetapi konteks ekonomi global dan domestik kini berbeda. Struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan produktivitas, deindustrialisasi dini, dominasi sektor informal, ketergantungan komoditas, ketimpangan wilayah, kualitas sumber daya manusia, kapasitas fiskal, dan kepastian regulasi. Dari perspektif ekonomi politik, pertumbuhan 8 persen dapat menjadi agenda mobilisasi nasional yang positif bila diarahkan pada produktivitas, industrialisasi, inovasi, pemerataan, dan keberlanjutan. Namun, target tersebut juga dapat menimbulkan risiko bila dikejar melalui ekspansi fiskal yang tidak disiplin, intervensi negara yang tidak efisien, proyek mercusuar, relaksasi tata kelola, atau tekanan terhadap independensi kebijakan moneter. Artikel ini menyimpulkan bahwa jalan realistis bagi Indonesia bukan sekadar mengejar angka 8 persen, melainkan membangun fondasi pertumbuhan tinggi yang sehat: investasi produktif, reformasi kelembagaan, industrialisasi bernilai tambah, peningkatan kualitas SDM, pendalaman pasar keuangan, digitalisasi UMKM, transisi energi, dan penguatan tata kelola. Pertumbuhan 8 persen harus dipahami sebagai hasil dari transformasi struktural, bukan sekadar target politik tahunan.

Kata Kunci

Pertumbuhan ekonomi; ekonomi politik; Indonesia; pertumbuhan 8 persen; Indonesia Emas 2045; investasi; produktivitas; industrialisasi; fiskal; kebijakan moneter; middle-income trap; transformasi struktural.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional. Dalam masyarakat modern, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan angka Produk Domestik Bruto, tetapi juga sebagai simbol kemajuan, kemampuan negara menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kelas menengah, dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, ketika muncul target pertumbuhan ekonomi 8 persen, diskusi publik segera bergerak melampaui pertanyaan teknis ekonomi. Target itu berubah menjadi isu ekonomi politik: siapa yang akan mendorong pertumbuhan, sektor mana yang diutamakan, siapa yang akan menikmati hasilnya, risiko apa yang ditanggung negara, dan bagaimana memastikan agar pertumbuhan tinggi tidak menimbulkan instabilitas baru.

Indonesia selama beberapa tahun terakhir relatif tumbuh di kisaran 5 persen. Dalam konteks global yang penuh gejolak, angka tersebut bukan pencapaian kecil. Banyak negara mengalami perlambatan akibat pandemi, perang dagang, konflik geopolitik, inflasi energi, dan pengetatan kebijakan moneter global. Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan berkat pasar domestik yang besar, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor komoditas, dan stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga. Namun, pertumbuhan 5 persen memunculkan pertanyaan strategis: apakah cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut cenderung mengarah pada kesimpulan bahwa pertumbuhan 5 persen penting sebagai fondasi, tetapi belum cukup untuk mengejar target Indonesia Emas 2045. Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah, memperbesar pendapatan per kapita, meningkatkan kualitas pekerjaan, memperkuat industri nasional, dan mengurangi ketimpangan, maka pertumbuhan perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Dalam konteks inilah target 8 persen muncul sebagai ambisi pembangunan.

Namun, pertumbuhan 8 persen bukan sekadar persoalan keinginan politik. Ia menuntut prasyarat ekonomi yang berat. Pertumbuhan tinggi membutuhkan investasi besar, produktivitas meningkat, tenaga kerja terampil, infrastruktur memadai, sistem keuangan kuat, birokrasi efisien, hukum yang dapat dipercaya, pasar ekspor yang luas, energi yang cukup, dan lingkungan global yang relatif mendukung. Tanpa itu, target 8 persen dapat menjadi slogan yang tidak menghasilkan transformasi nyata.

Artikel ini membahas pertumbuhan 8 persen dari sudut pandang ekonomi politik. Ekonomi politik memandang ekonomi bukan sebagai sistem teknis yang netral, tetapi sebagai arena interaksi antara negara, pasar, masyarakat, institusi, kepentingan, kekuasaan, dan distribusi manfaat. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan 8 persen tidak hanya ditanyakan "bagaimana mencapainya", tetapi juga "dengan cara apa, untuk siapa, dengan risiko apa, dan melalui institusi seperti apa."

2. Makna Ekonomi Politik dari Target Pertumbuhan 8 Persen

Target pertumbuhan 8 persen memiliki makna simbolik dan strategis. Secara simbolik, angka 8 persen menyiratkan keberanian politik untuk keluar dari pertumbuhan moderat. Ia memberi pesan bahwa Indonesia tidak ingin puas dengan pertumbuhan 5 persen. Secara strategis, target ini berkaitan dengan kebutuhan mempercepat kenaikan pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, membangun industri bernilai tambah, dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

Namun, dalam ekonomi politik, target angka juga dapat berfungsi sebagai alat mobilisasi. Pemerintah menggunakan target pertumbuhan untuk mengarahkan birokrasi, investor, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat. Target tinggi dapat menciptakan sense of urgency. Ia mendorong kementerian bekerja lebih cepat, investor melihat peluang, dan publik membangun ekspektasi positif.

Tetapi target tinggi juga memiliki risiko politik. Jika target terlalu ambisius tetapi tidak disertai kebijakan realistis, maka ia dapat menimbulkan kekecewaan. Jika target digunakan untuk membenarkan proyek besar tanpa evaluasi, maka pertumbuhan dapat berubah menjadi pemborosan. Jika target pertumbuhan menjadi alasan untuk melonggarkan standar lingkungan, melemahkan tata kelola, atau menekan independensi institusi ekonomi, maka biaya jangka panjangnya dapat lebih besar daripada manfaat jangka pendek.

Ekonomi politik pertumbuhan 8 persen karena itu harus memeriksa tiga dimensi. Pertama, **dimensi produksi**, yaitu apakah ekonomi Indonesia memiliki kapasitas riil untuk tumbuh tinggi melalui produktivitas, investasi, industri, teknologi, dan tenaga kerja. Kedua, **dimensi distribusi**, yaitu apakah hasil pertumbuhan akan dinikmati secara luas atau terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketiga, **dimensi institusi**, yaitu apakah negara mampu mengelola pertumbuhan tinggi secara kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan 8 persen yang sehat harus mencerminkan peningkatan kapasitas produksi nasional. Pertumbuhan tidak boleh semata-mata berasal dari konsumsi yang dibiayai utang, ekspansi fiskal jangka pendek, atau kenaikan harga komoditas sementara. Pertumbuhan harus berasal dari kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah tinggi secara lebih efisien. Di sinilah produktivitas menjadi kata kunci.

3. Pertumbuhan 5 Persen sebagai Fondasi dan Batas

Selama beberapa tahun, Indonesia relatif stabil pada pertumbuhan sekitar 5 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama. Belanja pemerintah menopang permintaan. Investasi berjalan meskipun belum optimal. Ekspor komoditas membantu neraca perdagangan ketika harga global menguntungkan.

Namun, pertumbuhan 5 persen juga menunjukkan batas struktural. Jika Indonesia terus berada pada jalur 5 persen, kenaikan pendapatan per kapita menuju status negara maju akan berlangsung lebih lambat. Dalam jangka pendek, 5 persen cukup untuk menjaga stabilitas. Dalam jangka panjang, 5 persen belum tentu cukup untuk mengejar negara maju, terutama jika pertumbuhan penduduk, fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan standar pendapatan tinggi ikut diperhitungkan.

Pertumbuhan 5 persen juga belum cukup untuk menyerap tenaga kerja muda secara berkualitas. Indonesia membutuhkan pekerjaan formal, produktif, dan berupah layak. Jika pertumbuhan terjadi terutama di sektor informal, jasa berupah rendah, dan komoditas padat modal, maka angka PDB dapat tumbuh tanpa peningkatan kesejahteraan yang luas. Ini adalah salah satu dilema ekonomi Indonesia: pertumbuhan terjadi, tetapi kualitas pekerjaan belum selalu meningkat sepadan.

Selain itu, pertumbuhan 5 persen belum cukup untuk mengurangi ketimpangan wilayah secara cepat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kesenjangan besar antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, pusat industri dan daerah tertinggal, wilayah barat dan timur. Pertumbuhan nasional 5 persen bisa menyembunyikan ketimpangan spasial. Untuk Indonesia Emas 2045, pertumbuhan harus menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa.

Dengan demikian, pertumbuhan 5 persen adalah fondasi, tetapi bukan lompatan. Ia menjaga ekonomi tetap berjalan, tetapi belum tentu cukup untuk transformasi. Target 8 persen lahir dari kebutuhan melakukan lompatan tersebut. Namun, lompatan ekonomi harus dirancang, bukan hanya diumumkan.

4. Apakah Pertumbuhan 8 Persen Realistis?

Pertumbuhan 8 persen bukan angka yang sepenuhnya mustahil. Beberapa negara Asia pernah mencapai pertumbuhan tinggi dalam periode

industrialisasi cepat, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan India pada fase tertentu. Indonesia sendiri pernah mengalami pertumbuhan tinggi pada masa sebelum krisis Asia 1997–1998. Namun, konteks hari ini berbeda.

Pertama, lingkungan global kini lebih sulit. Perdagangan dunia tidak tumbuh secepat era globalisasi 1990-an dan 2000-an. Geopolitik memecah rantai pasok. Proteksionisme meningkat. Standar lingkungan dan ketenagakerjaan semakin ketat. Negara-negara bersaing menarik investasi manufaktur. Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pasar global yang terbuka luas.

Kedua, Indonesia menghadapi deindustrialisasi dini. Kontribusi manufaktur tidak sekuat yang diperlukan untuk lompatan ekonomi. Padahal, pertumbuhan tinggi di banyak negara Asia ditopang oleh ekspansi manufaktur ekspor, peningkatan produktivitas industri, dan integrasi ke rantai nilai global. Tanpa revitalisasi manufaktur, 8 persen sulit dicapai secara berkelanjutan.

Ketiga, produktivitas Indonesia masih menjadi tantangan. Pertumbuhan tinggi tidak bisa hanya mengandalkan lebih banyak investasi fisik. Jika produktivitas rendah, tambahan investasi menghasilkan output yang terbatas. Dalam bahasa ekonomi, ICOR menjadi tinggi: untuk menghasilkan tambahan pertumbuhan yang sama, diperlukan investasi yang semakin besar. Pertumbuhan 8 persen membutuhkan investasi besar sekaligus efisiensi investasi.

Keempat, sistem pendidikan dan keterampilan tenaga kerja belum sepenuhnya siap. Industri modern membutuhkan pekerja dengan literasi digital, kemampuan teknis, disiplin, kreativitas, pemecahan masalah, dan adaptabilitas. Jika kualitas SDM tidak meningkat, investasi besar sekalipun tidak otomatis menghasilkan produktivitas tinggi.

Kelima, kapasitas fiskal terbatas. Pemerintah membutuhkan dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, perlindungan sosial,

pertahanan, transisi energi, dan program prioritas lain. Jika semua didorong secara ekspansif tanpa peningkatan penerimaan negara, risiko defisit dan utang meningkat.

Oleh karena itu, pertumbuhan 8 persen realistis hanya jika Indonesia melakukan transformasi besar. Tanpa transformasi, target itu terlalu ambisius. Dengan transformasi yang tepat, target itu dapat menjadi arah mobilisasi nasional, meskipun pencapaiannya mungkin bertahap.

5. Investasi sebagai Mesin Pertumbuhan: Antara Kebutuhan dan Risiko

Pertumbuhan 8 persen membutuhkan investasi sangat besar. Investasi diperlukan untuk membangun pabrik, infrastruktur, energi, transportasi, teknologi, pendidikan, kesehatan, kawasan industri, pelabuhan, dan ekosistem digital. Tanpa investasi, kapasitas produksi tidak meningkat.

Namun, investasi bukan hanya soal jumlah. Kualitas investasi jauh lebih penting. Investasi produktif adalah investasi yang meningkatkan kapasitas ekonomi, menciptakan pekerjaan, memperkuat teknologi, meningkatkan ekspor, dan memperbesar nilai tambah domestik. Sebaliknya, investasi yang tidak produktif dapat menambah utang, merusak lingkungan, dan menghasilkan aset yang kurang dimanfaatkan.

Dalam ekonomi politik, investasi juga berkaitan dengan siapa yang mengendalikan proyek, siapa yang mendapatkan konsesi, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang menikmati keuntungan. Jika investasi besar terlalu terkonsentrasi pada kelompok tertentu, pertumbuhan dapat memperbesar ketimpangan. Jika investasi didorong melalui proyek negara tanpa transparansi, risiko korupsi meningkat. Jika investasi asing masuk tanpa transfer teknologi dan keterkaitan lokal, nilai tambah nasional terbatas.

Indonesia membutuhkan kombinasi investasi domestik dan asing. Investasi asing penting untuk modal, teknologi, pasar ekspor, dan integrasi rantai

pasok. Namun, investasi asing harus diarahkan agar menciptakan linkage dengan industri lokal. Investasi domestik penting untuk memperkuat pengusaha nasional, UMKM, BUMN, koperasi, dan industri daerah.

Untuk mencapai 8 persen, Indonesia harus memperbaiki iklim investasi. Kepastian hukum, perizinan cepat, regulasi konsisten, kualitas infrastruktur, stabilitas politik, sistem perpajakan yang jelas, dan tenaga kerja terampil menjadi faktor penentu. Investor tidak hanya mencari pasar besar; mereka mencari kepastian dan produktivitas.

6. Produktivitas: Titik Lemah yang Harus Menjadi Titik Balik

Produktivitas adalah inti dari pertumbuhan tinggi. Tanpa produktivitas, pertumbuhan 8 persen hanya dapat dicapai melalui ekspansi input besar-besaran: lebih banyak modal, lebih banyak tenaga kerja, lebih banyak lahan, lebih banyak sumber daya alam. Model seperti itu tidak berkelanjutan. Pada titik tertentu, biaya meningkat, lingkungan rusak, dan hasil tambahan menurun.

Produktivitas meningkat ketika pekerja lebih terampil, teknologi lebih baik, manajemen lebih efisien, logistik lebih murah, birokrasi lebih cepat, energi lebih andal, dan inovasi lebih kuat. Produktivitas juga meningkat ketika sumber daya berpindah dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi. Inilah makna transformasi struktural.

Indonesia masih memiliki banyak pekerja di sektor informal dan sektor berproduktivitas rendah. Banyak UMKM bertahan, tetapi belum naik kelas. Banyak industri menggunakan teknologi menengah-rendah. Banyak daerah memiliki potensi ekonomi, tetapi terkendala infrastruktur, pendidikan, dan akses pasar. Semua ini menahan produktivitas nasional.

Untuk menjadikan produktivitas sebagai titik balik, Indonesia perlu melakukan reformasi di beberapa bidang. Pendidikan dasar harus memperkuat literasi, numerasi, sains, dan karakter. Pendidikan vokasi harus

terhubung dengan industri. Perguruan tinggi harus memperkuat riset terapan. Dunia usaha harus meningkatkan pelatihan pekerja. Pemerintah harus memperbaiki birokrasi, logistik, dan regulasi.

Produktivitas juga memerlukan kompetisi sehat. Jika pasar terlalu tertutup, perusahaan tidak terdorong berinovasi. Jika monopoli dan rente terlalu besar, pelaku ekonomi mencari keuntungan melalui kedekatan politik, bukan efisiensi. Karena itu, pertumbuhan 8 persen membutuhkan tata kelola persaingan yang sehat.

7. Industrialisasi dan Hilirisasi: Jalan Utama atau Jebakan Baru?

Hilirisasi menjadi salah satu strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan. Logikanya sederhana: Indonesia tidak ingin terus mengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Dengan mengolah nikel, bauksit, tembaga, kelapa sawit, gas, dan hasil laut di dalam negeri, Indonesia dapat menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, teknologi, dan penerimaan negara.

Strategi ini penting. Negara yang ingin naik kelas perlu membangun industri. Hilirisasi dapat menjadi pintu masuk menuju industrialisasi. Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan dasar. Jika Indonesia hanya membangun smelter tetapi tidak mengembangkan industri komponen, teknologi, desain, riset, dan merek, maka nilai tambah tertinggi tetap berada di luar negeri.

Dalam ekonomi politik, hilirisasi juga memiliki risiko. Pertama, risiko konsentrasi kekuasaan ekonomi. Industri berbasis mineral membutuhkan modal besar, sehingga cenderung dikuasai korporasi besar. Kedua, risiko lingkungan. Smelter dan industri berat membutuhkan energi besar dan dapat menimbulkan polusi jika tidak dikelola. Ketiga, risiko fiskal. Insentif pajak dan fasilitas negara dapat mengurangi penerimaan bila tidak dirancang hati-hati. Keempat, risiko ketergantungan baru. Indonesia dapat

keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah, tetapi masuk ke ketergantungan teknologi dan pasar luar negeri.

Agar hilirisasi menjadi jalan utama, bukan jebakan baru, kebijakan harus diarahkan pada industrial upgrading. Indonesia harus membangun ekosistem: riset material, teknologi baterai, manufaktur kendaraan listrik, daur ulang, energi bersih, pemasok lokal, pendidikan teknik, dan standar lingkungan. Hilirisasi harus diukur bukan hanya dari jumlah pabrik, tetapi dari peningkatan kandungan lokal, ekspor produk bernilai tambah, pekerjaan berkualitas, dan kemampuan teknologi nasional.

8. Fiskal Ekspansif: Antara Stimulus dan Disiplin

Pertumbuhan 8 persen sering membutuhkan peran fiskal yang lebih aktif. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan melalui belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, riset, dan insentif industri. Namun, fiskal ekspansif harus dikelola hati-hati.

Jika belanja pemerintah produktif, maka ia dapat meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Infrastruktur yang baik menurunkan biaya logistik. Pendidikan meningkatkan modal manusia. Kesehatan meningkatkan produktivitas. Riset mendorong inovasi. Perlindungan sosial menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Namun, jika belanja tidak tepat sasaran, pertumbuhan hanya meningkat sementara sementara defisit dan utang bertambah.

Risiko fiskal muncul ketika pemerintah terlalu banyak membuat program besar tanpa evaluasi manfaat-biaya yang kuat. Dalam politik, program besar sering menarik karena mudah dikomunikasikan kepada publik. Tetapi pembangunan bukan hanya soal program yang populer. Pembangunan membutuhkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan.

Pertumbuhan 8 persen tidak boleh dicapai dengan mengorbankan disiplin fiskal. Jika pasar melihat defisit melebar tanpa rencana konsolidasi, premi

risiko naik. Yield obligasi meningkat, rupiah melemah, dan biaya pembiayaan pemerintah bertambah. Pada akhirnya, ruang fiskal untuk pembangunan justru menyempit.

Karena itu, fiskal harus diarahkan pada belanja produktif dan reformasi penerimaan negara. Rasio pajak perlu diperkuat melalui administrasi yang lebih baik, perluasan basis pajak, digitalisasi perpajakan, kepatuhan, dan keadilan pajak. Tanpa penerimaan negara yang kuat, ambisi pertumbuhan tinggi akan bergantung pada utang atau pembiayaan tidak berkelanjutan.

9. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Rupiah: Batas Ambisi Pertumbuhan

Pertumbuhan 8 persen tidak dapat dilepaskan dari stabilitas moneter. Jika pemerintah mendorong pertumbuhan melalui ekspansi fiskal dan kredit, sementara inflasi meningkat dan rupiah melemah, Bank Indonesia harus merespons dengan kebijakan moneter ketat. Di sini muncul ketegangan antara ambisi pertumbuhan dan stabilitas.

Bank sentral bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi. Dalam ekonomi terbuka, rupiah sangat dipengaruhi oleh arus modal, suku bunga global, harga komoditas, neraca perdagangan, dan sentimen investor. Jika investor melihat kebijakan ekonomi terlalu ekspansif atau tidak kredibel, rupiah dapat tertekan. Pelemahan rupiah dapat memicu imported inflation, terutama karena Indonesia masih mengimpor energi, bahan baku, dan barang modal.

Kenaikan suku bunga membantu stabilitas rupiah, tetapi dapat menekan investasi dan konsumsi. Sebaliknya, suku bunga rendah dapat mendorong kredit, tetapi berisiko melemahkan rupiah jika kondisi global tidak mendukung. Dengan demikian, pertumbuhan 8 persen membutuhkan koordinasi fiskal-moneter yang kuat, tetapi koordinasi tidak boleh berarti hilangnya independensi bank sentral.

Independensi Bank Indonesia adalah aset kredibilitas nasional. Jika pasar menilai kebijakan moneter tunduk pada target pertumbuhan politik, ekspektasi inflasi dapat memburuk. Pertumbuhan tinggi yang sehat justru membutuhkan bank sentral kredibel. Stabilitas rupiah dan inflasi adalah fondasi investasi jangka panjang.

Jalan realistisnya adalah membangun pertumbuhan dari sisi penawaran: produktivitas, efisiensi, investasi, dan teknologi. Jika pertumbuhan berasal dari kapasitas produksi yang meningkat, tekanan inflasi lebih rendah. Tetapi jika pertumbuhan didorong terutama oleh permintaan jangka pendek, risiko inflasi lebih besar.

10. State-Led Capitalism: Peluang dan Risiko

Salah satu ciri ekonomi politik Indonesia adalah peran negara yang besar. Negara hadir melalui APBN, BUMN, regulasi, perizinan, subsidi, proyek strategis, dan lembaga investasi. Dalam upaya mengejar 8 persen, peran negara kemungkinan semakin menonjol. Pertanyaannya: apakah state-led capitalism dapat menjadi mesin pertumbuhan atau justru menciptakan distorsi?

Peran negara penting dalam pembangunan. Banyak negara Asia Timur berhasil karena negara mampu mengarahkan industrialisasi, membangun infrastruktur, mendukung ekspor, dan menciptakan koordinasi antara sektor publik dan swasta. Negara dapat mengatasi kegagalan pasar, menyediakan barang publik, dan mendorong sektor strategis.

Namun, peran negara juga memiliki risiko. Jika negara terlalu dominan tetapi tata kelola lemah, ekonomi dapat dikuasai rente. Proyek dipilih bukan karena produktivitas, tetapi karena kepentingan politik. BUMN dapat menjadi alat kebijakan tanpa disiplin komersial. Subsidi dapat menciptakan ketergantungan. Investasi negara dapat menyingkirkan swasta jika tidak dirancang hati-hati.

State-led capitalism yang sehat membutuhkan disiplin. Negara harus menetapkan arah strategis, tetapi tetap menjaga kompetisi, transparansi, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. BUMN harus diberi mandat jelas dan diukur secara profesional. Proyek strategis harus melalui analisis kelayakan. Insentif industri harus berbasis kinerja, bukan permanen.

Dalam konteks Indonesia, negara perlu menjadi enabler, bukan sekadar operator. Negara membangun infrastruktur, kualitas manusia, regulasi, dan ekosistem. Swasta, UMKM, koperasi, dan masyarakat kemudian dapat bergerak lebih produktif. Pertumbuhan 8 persen tidak mungkin dicapai hanya oleh negara; ia membutuhkan mobilisasi seluruh kapasitas nasional.

11. UMKM dan Ekonomi Rakyat: Jangan Tertinggal dalam Agenda 8 Persen

Pertumbuhan 8 persen sering dibayangkan melalui proyek besar, investasi besar, kawasan industri, hilirisasi mineral, dan infrastruktur. Namun, ekonomi Indonesia juga ditopang oleh UMKM. Jika UMKM tidak naik kelas, pertumbuhan tinggi dapat menjadi tidak inklusif.

UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi banyak yang berproduktivitas rendah. Tantangan UMKM meliputi akses modal, teknologi, kualitas produk, manajemen, pemasaran, sertifikasi, logistik, dan literasi digital. Digitalisasi membuka peluang, tetapi juga menimbulkan kompetisi yang lebih keras. Banyak UMKM masuk platform digital, tetapi belum tentu meningkat profitabilitasnya karena biaya platform, iklan, persaingan harga, dan lemahnya diferensiasi produk.

Pertumbuhan 8 persen harus memasukkan UMKM ke dalam rantai nilai produktif. UMKM perlu terhubung dengan industri besar, pariwisata, pangan, ekonomi kreatif, ekspor, dan pengadaan pemerintah. Program UMKM harus bergeser dari bantuan umum menuju peningkatan produktivitas. Pendampingan, digital accounting, akses pembiayaan,

standardisasi kualitas, kemasan, sertifikasi halal, desain produk, dan akses pasar harus menjadi prioritas.

Ekonomi rakyat juga terkait desa. Indonesia memiliki ribuan desa dengan potensi pertanian, perikanan, pariwisata, kerajinan, energi lokal, dan ekonomi komunitas. Jika desa hanya dipandang sebagai penerima bantuan, kontribusinya terbatas. Tetapi jika desa dipandang sebagai pusat produksi, maka pertumbuhan dapat lebih merata. Pertumbuhan 8 persen harus memiliki kaki di daerah, bukan hanya di kota besar.

12. Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Risiko Jobless Growth

Pertumbuhan tinggi belum tentu otomatis menciptakan pekerjaan berkualitas. Jika pertumbuhan didorong oleh sektor padat modal seperti tambang, smelter, infrastruktur berat, atau digital platform yang sangat efisien tenaga kerja, maka dampaknya terhadap pekerjaan bisa terbatas. Indonesia perlu menghindari jobless growth.

Masalah utama tenaga kerja Indonesia adalah ketidaksesuaian keterampilan. Banyak lulusan pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak pekerja berada di sektor informal. Banyak anak muda bekerja di gig economy tanpa perlindungan memadai. Jika transformasi teknologi berjalan cepat, pekerja berpendidikan rendah dapat semakin tertinggal.

Pertumbuhan 8 persen membutuhkan revolusi kualitas SDM. Pendidikan dasar harus kuat. Guru harus ditingkatkan kualitasnya. Pendidikan vokasi harus relevan dengan industri. Perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi. Pelatihan kerja harus fleksibel dan berbasis kebutuhan pasar. Reskilling dan upskilling menjadi agenda nasional, terutama di era AI, otomasi, dan transisi energi.

Selain keterampilan teknis, Indonesia membutuhkan keterampilan lunak: disiplin, integritas, kerja sama, komunikasi, kepemimpinan, dan

kemampuan belajar. Negara maju bukan hanya memiliki teknologi, tetapi juga budaya produktivitas. Dalam konteks ini, pembangunan manusia adalah inti dari pertumbuhan 8 persen.

13. Ketimpangan Wilayah dan Politik Distribusi Pertumbuhan

Pertumbuhan 8 persen dapat menjadi sumber optimisme, tetapi juga dapat memperbesar ketimpangan jika terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Indonesia memiliki struktur geografis yang kompleks. Jawa masih menjadi pusat ekonomi, industri, infrastruktur, pendidikan, dan pasar. Sementara itu, banyak wilayah luar Jawa memiliki sumber daya besar tetapi infrastruktur dan kualitas SDM masih terbatas.

Ekonomi politik pertumbuhan harus memperhatikan distribusi spasial. Jika investasi hilirisasi hanya terkonsentrasi di beberapa kawasan, manfaatnya tidak otomatis menyebar. Jika daerah penghasil sumber daya hanya menjadi lokasi ekstraksi, tetapi nilai tambah, pajak, teknologi, dan pekerjaan berkualitas berada di tempat lain, maka ketidakadilan wilayah dapat meningkat.

Pemerataan tidak berarti semua daerah harus melakukan hal yang sama. Setiap daerah memiliki keunggulan berbeda. Wilayah pesisir dapat memperkuat ekonomi maritim. Daerah pertanian dapat membangun agroindustri. Daerah wisata dapat mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Daerah mineral dapat membangun industri pengolahan. Daerah perkotaan dapat menjadi pusat jasa modern dan ekonomi digital.

Pemerintah pusat perlu membangun kerangka kebijakan yang memungkinkan daerah berkembang sesuai potensinya. Infrastruktur, internet, pelabuhan, listrik, pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan daerah menjadi kunci. Pertumbuhan 8 persen yang realistis harus menjadi pertumbuhan nasional yang memiliki banyak pusat, bukan pertumbuhan yang menumpuk di satu wilayah.

14. Transisi Energi dan Batas Ekologis Pertumbuhan

Pertumbuhan 8 persen membutuhkan energi besar. Pabrik, transportasi, data center, smelter, kawasan industri, dan kota modern membutuhkan listrik dan bahan bakar. Namun, dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia menghadapi dilema: mengejar industrialisasi cepat sambil menurunkan emisi dan menjaga lingkungan.

Jika pertumbuhan tinggi didorong oleh energi fosil murah tanpa transisi, Indonesia dapat menghadapi risiko jangka panjang. Produk ekspor dapat terkena standar karbon. Kerusakan lingkungan menimbulkan biaya kesehatan dan bencana. Ketergantungan pada batu bara dan minyak dapat menghambat inovasi energi bersih.

Namun, transisi energi juga tidak mudah. Energi terbarukan membutuhkan investasi besar, teknologi, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan regulasi yang konsisten. Industri membutuhkan pasokan energi yang andal dan terjangkau. Oleh karena itu, transisi energi harus dirancang bertahap tetapi tegas.

Pertumbuhan 8 persen harus menjadi pertumbuhan hijau. Indonesia memiliki potensi panas bumi, surya, hidro, bioenergi, angin, karbon hutan, karbon biru, dan ekonomi sirkular. Jika dikelola baik, transisi hijau bukan beban, tetapi sumber pertumbuhan baru. Industri energi bersih, kendaraan listrik, efisiensi energi, daur ulang, dan jasa lingkungan dapat menciptakan pekerjaan dan investasi.

Ekonomi politik lingkungan juga penting. Jangan sampai masyarakat lokal menanggung biaya lingkungan sementara keuntungan dinikmati korporasi besar. Pertumbuhan hijau harus adil, melibatkan masyarakat, dan memperhatikan hak generasi mendatang.

15. Risiko Utama Jika Target 8 Persen Dikejar Secara Keliru

Target 8 persen memiliki nilai mobilisasi, tetapi juga risiko. Ada beberapa risiko utama jika target ini dikejar secara keliru.

Pertama, **risiko overheating**. Jika pertumbuhan dipacu melalui permintaan berlebihan tanpa peningkatan kapasitas produksi, inflasi dapat naik. Permintaan impor meningkat, defisit transaksi berjalan melebar, rupiah melemah, dan bank sentral harus mengetatkan kebijakan.

Kedua, **risiko fiskal**. Program besar dan proyek infrastruktur dapat memperlebar defisit jika tidak diimbangi penerimaan negara. Utang meningkat, beban bunga naik, dan ruang fiskal masa depan menyempit.

Ketiga, **risiko proyek tidak produktif**. Karena tekanan mengejar angka, proyek dapat dipilih karena cepat menyerap anggaran atau terlihat besar, bukan karena manfaat ekonomi. Ini dapat menghasilkan white elephant projects.

Keempat, **risiko pelemahan tata kelola**. Ambisi tinggi kadang digunakan untuk mempercepat izin, melemahkan pengawasan, atau mengabaikan standar lingkungan. Jika ini terjadi, biaya sosial dan ekologis meningkat.

Kelima, **risiko ketimpangan**. Pertumbuhan tinggi yang dinikmati kelompok modal besar dapat memperlebar kesenjangan jika tidak disertai kebijakan inklusif.

Keenam, **risiko ketergantungan pada komoditas**. Jika 8 persen dicapai karena boom komoditas sementara, pertumbuhan akan rapuh ketika harga turun.

Ketujuh, **risiko tekanan terhadap institusi independen**. Jika bank sentral atau lembaga pengawas ditekan untuk mendukung pertumbuhan jangka pendek, kredibilitas ekonomi dapat melemah.

Risiko-risiko ini tidak berarti target 8 persen harus ditolak. Risiko tersebut berarti target 8 persen harus dikelola dengan desain kebijakan yang kuat.

16. Jalan Realistis: Dari Ambisi ke Strategi Bertahap

Jalan realistis bagi Indonesia bukan menolak ambisi 8 persen, tetapi menerjemahkannya menjadi strategi bertahap. Pertumbuhan 8 persen tidak mungkin dicapai hanya dengan satu kebijakan. Ia membutuhkan rangkaian reformasi yang saling mendukung.

Tahap pertama adalah **memperkuat stabilitas dan kredibilitas**. Inflasi, rupiah, defisit fiskal, dan sistem keuangan harus dijaga. Tanpa stabilitas, investasi jangka panjang tidak akan masuk. Pemerintah perlu memastikan bahwa ambisi pertumbuhan tidak mengorbankan disiplin makro.

Tahap kedua adalah **menaikkan investasi produktif**. Investasi harus diarahkan ke sektor yang meningkatkan kapasitas produksi: manufaktur, energi, pangan, infrastruktur, logistik, pendidikan, kesehatan, digital, dan riset. Investasi harus dievaluasi berdasarkan dampak produktivitas.

Tahap ketiga adalah **mengubah struktur ekonomi**. Indonesia harus memperkuat manufaktur dan jasa modern. Hilirisasi harus naik kelas. UMKM harus masuk rantai nilai. Pertanian harus menjadi agroindustri. Pariwisata harus berkualitas. Ekonomi digital harus menciptakan nilai tambah lokal.

Tahap keempat adalah **meningkatkan produktivitas SDM**. Pendidikan, vokasi, kesehatan, gizi, pelatihan, dan teknologi harus menjadi prioritas. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebelum berubah menjadi beban demografi.

Tahap kelima adalah **memperkuat institusi dan tata kelola**. Regulasi harus konsisten. Korupsi harus ditekan. Birokrasi harus melayani. Data harus digunakan dalam kebijakan. Evaluasi program harus berbasis hasil, bukan hanya serapan anggaran.

Dengan strategi ini, pertumbuhan dapat meningkat secara bertahap dari 5 persen menuju 6 persen, lalu 7 persen, dan akhirnya mendekati 8 persen.

Yang penting bukan hanya kapan 8 persen tercapai, tetapi apakah jalur menuju 8 persen memperkuat fondasi ekonomi nasional.

17. Agenda Kebijakan Prioritas

Ada sepuluh agenda kebijakan prioritas untuk mendekati pertumbuhan 8 persen secara realistis.

Pertama, **reformasi produktivitas nasional**. Pemerintah perlu mengukur produktivitas sektoral, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun program peningkatan produktivitas lintas sektor.

Kedua, **revitalisasi manufaktur**. Industri pengolahan harus kembali menjadi mesin pertumbuhan. Fokus perlu diberikan pada sektor bernilai tambah seperti elektronik, farmasi, alat kesehatan, otomotif listrik, baterai, pangan olahan, petrokimia, dan industri maritim.

Ketiga, **hilirisasi berbasis inovasi**. Hilirisasi harus dikaitkan dengan riset, teknologi, pemasok lokal, dan ekspor produk akhir.

Keempat, **reformasi pendidikan dan vokasi**. Kurikulum harus relevan dengan masa depan kerja. Pendidikan vokasi harus memiliki kemitraan kuat dengan industri.

Kelima, **penguatan UMKM produktif**. UMKM perlu didorong naik kelas melalui pembiayaan, digitalisasi, sertifikasi, kualitas produk, dan integrasi rantai pasok.

Keenam, **pendalaman pasar keuangan**. Indonesia membutuhkan pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur dan industri. Dana pensiun, asuransi, obligasi korporasi, pasar modal, dan instrumen hijau perlu diperkuat.

Ketujuh, **ketahanan pangan dan energi**. Pertumbuhan tinggi membutuhkan harga pangan dan energi yang stabil. Reformasi tata niaga, produksi lokal, energi terbarukan, dan efisiensi harus dipercepat.

Kedelapan, **reformasi fiskal**. Rasio pajak harus ditingkatkan, belanja tidak produktif dikurangi, dan subsidi dibuat lebih tepat sasaran.

Kesembilan, **digitalisasi pemerintahan**. Digital government dapat mengurangi korupsi, mempercepat layanan, memperbaiki data, dan meningkatkan efisiensi kebijakan.

Kesepuluh, **pemerataan wilayah**. Pusat pertumbuhan baru perlu dibangun di luar Jawa melalui infrastruktur, kawasan industri, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas digital.

18. Peran Perguruan Tinggi dan Generasi Muda

Pertumbuhan 8 persen tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah dan pengusaha. Perguruan tinggi dan generasi muda memiliki peran strategis. Perguruan tinggi harus menjadi pusat pengetahuan, riset, inovasi, kewirausahaan, dan kritik kebijakan. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga solusi.

Generasi muda adalah aktor utama Indonesia 2045. Mereka akan menjadi pekerja, wirausahawan, pemimpin, peneliti, teknokrat, birokrat, dan warga negara pada saat Indonesia memasuki usia 100 tahun. Jika generasi muda hanya menjadi konsumen teknologi, Indonesia akan tertinggal. Jika mereka menjadi pencipta teknologi, Indonesia dapat melompat.

Pendidikan tinggi perlu memperkuat literasi AI, data science, manajemen inovasi, kewirausahaan, etika digital, ekonomi hijau, dan kepemimpinan adaptif. Namun, teknologi harus tetap dipadukan dengan karakter, integritas, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial. Pertumbuhan tinggi tanpa etika dapat menimbulkan eksploitasi. Pertumbuhan tinggi dengan etika dapat menjadi pembangunan peradaban.

19. Indikator Keberhasilan: Bukan Sekadar Angka PDB

Jika Indonesia ingin mengejar pertumbuhan 8 persen secara sehat, indikator keberhasilan tidak boleh hanya PDB. Ada beberapa indikator tambahan yang perlu dipantau.

Pertama, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Kedua, peningkatan kontribusi manufaktur bernilai tambah. Ketiga, penurunan sektor informal. Keempat, peningkatan ekspor produk bernilai tambah. Kelima, peningkatan rasio pajak. Keenam, penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Ketujuh, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kedelapan, penurunan emisi dan kerusakan lingkungan. Kesembilan, peningkatan investasi riset dan inovasi. Kesepuluh, pemerataan pertumbuhan antarwilayah.

Dengan indikator ini, pertumbuhan 8 persen tidak menjadi angka kosong. Ia menjadi ukuran transformasi. Jika PDB tumbuh tinggi tetapi ketimpangan melebar, lingkungan rusak, pekerjaan informal dominan, dan produktivitas stagnan, maka pertumbuhan tersebut tidak sehat. Sebaliknya, jika pertumbuhan disertai peningkatan kualitas hidup, maka Indonesia benar-benar bergerak menuju negara maju.

20. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah ambisi besar yang dapat menjadi energi politik pembangunan Indonesia. Ambisi ini penting karena pertumbuhan 5 persen kemungkinan belum cukup untuk membawa Indonesia menuju status negara maju pada 2045. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi agar pendapatan per kapita meningkat lebih cepat, lapangan kerja berkualitas bertambah, industrialisasi menguat, dan middle-income trap dapat dihindari.

Namun, pertumbuhan 8 persen tidak boleh diperlakukan sebagai mantra politik. Ia harus dipahami sebagai hasil dari transformasi struktural. Tanpa produktivitas, investasi berkualitas, SDM unggul, industri bernilai tambah, fiskal sehat, moneter kredibel, dan tata kelola kuat, target 8 persen akan

sulit dicapai. Bahkan jika dicapai sesaat, ia dapat rapuh dan menimbulkan risiko baru.

Ekonomi politik pertumbuhan 8 persen mengajarkan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal institusi, distribusi, legitimasi, dan keberlanjutan. Pertumbuhan tinggi harus menjawab pertanyaan: siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah generasi mendatang akan mewarisi ekonomi yang lebih kuat.

Jalan realistis bagi Indonesia adalah menjadikan 8 persen sebagai arah transformasi, bukan sekadar target tahunan. Pertumbuhan harus naik bertahap melalui reformasi produktivitas, revitalisasi manufaktur, hilirisasi inovatif, transformasi UMKM, pendidikan berkualitas, transisi energi, reformasi fiskal, pendalaman keuangan, dan tata kelola yang bersih.

Dengan demikian, pertumbuhan 8 persen bukan mustahil, tetapi tidak otomatis. Ia membutuhkan kerja keras, disiplin kebijakan, dan kepemimpinan yang mampu menggabungkan keberanian politik dengan kehati-hatian ekonomi. Indonesia dapat mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi harus melakukannya dengan cara yang realistis, inklusif, produktif, hijau, dan berkeadilan. Itulah jalan menuju Indonesia Emas 2045.

Glossarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah Indonesia.

Bonus Demografi

Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif, sehingga berpotensi mempercepat pertumbuhan jika didukung pekerjaan produktif.

Capital Outflow

Keluarnya dana atau modal dari suatu negara ke luar negeri, biasanya

karena perubahan suku bunga global, risiko politik, atau ekspektasi nilai tukar.

Deindustrialisasi Dini

Penurunan peran sektor manufaktur sebelum suatu negara mencapai status pendapatan tinggi.

Ekonomi Politik

Kajian mengenai hubungan antara ekonomi, kekuasaan, institusi, kebijakan publik, dan distribusi sumber daya.

Fiscal Dominance

Kondisi ketika kebijakan moneter terlalu dipengaruhi kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah.

Hilirisasi

Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

ICOR atau Incremental Capital Output Ratio

Rasio yang menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output tertentu. ICOR tinggi menunjukkan investasi kurang efisien.

Imported Inflation

Inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor akibat pelemahan mata uang atau kenaikan harga global.

Indonesia Emas 2045

Visi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan pada 100 tahun kemerdekaan.

Jobless Growth

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah memadai.

Middle-Income Trap

Kondisi ketika negara pendapatan menengah gagal naik menjadi negara

pendapatan tinggi karena produktivitas dan inovasi tidak meningkat cukup cepat.

Policy Mix

Bauran kebijakan yang menggabungkan kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, perdagangan, industri, dan struktural.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih bernilai dengan input yang sama atau lebih efisien.

Rupiah

Mata uang Indonesia dan salah satu indikator stabilitas makroekonomi nasional.

State-Led Capitalism

Model kapitalisme yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengarahkan investasi, industri, dan pembangunan ekonomi.

Transformasi Struktural

Perubahan struktur ekonomi dari sektor bernilai tambah rendah menuju sektor bernilai tambah tinggi.

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi basis ekonomi rakyat.

White Elephant Project

Proyek besar yang mahal tetapi manfaat ekonominya rendah atau tidak sepadan dengan biaya.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Aghion, P., & Howitt, P. (2009). *The economics of growth*. MIT Press.

- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60(2), 323–351. <https://doi.org/10.2307/2951599>
- Aizenman, J., Chinn, M. D., & Ito, H. (2010). The emerging global financial architecture: Tracing and evaluating new patterns of the trilemma configuration. *Journal of International Money and Finance*, 29(4), 615–641. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2010.01.005>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen*. BPS-Statistics Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate naik 50 bps menjadi 5,25%: Memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic growth* (2nd ed.). MIT Press.
- Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. *Econometrica*, 77(3), 623–685. <https://doi.org/10.3982/ECTA6248>
- Calvo, G. A., & Reinhart, C. M. (2002). Fear of floating. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(2), 379–408. <https://doi.org/10.1162/003355302753650274>
- Forbes, K. J., & Warnock, F. E. (2012). Capital flow waves: Surges, stops, flight, and retrenchment. *Journal of International Economics*, 88(2), 235–251. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2012.03.006>
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- Gill, I., & Kharas, H. (2007). *An East Asian renaissance: Ideas for economic growth*. World Bank.

Gupta, K. (2026). Prabowonomics: Can Indonesia really grow at 8%? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.

<https://doi.org/10.1080/00074918.2026.2638632>

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>

Juhro, S. M., Iyke, B. N., & Narayan, P. K. (2024). Capital flow dynamics and the synchronization of financial cycles and business cycles in emerging market economies. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 92, Article 101980. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2024.101980>

Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.

Krugman, P. (1994). The myth of Asia's miracle. *Foreign Affairs*, 73(6), 62–78. <https://doi.org/10.2307/20046929>

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473–491. <https://doi.org/10.1086/260580>

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Obstfeld, M., Shambaugh, J. C., & Taylor, A. M. (2005). The trilemma in history: Tradeoffs among exchange rates, monetary policies, and capital mobility. *The Review of Economics and Statistics*, 87(3), 423–438. <https://doi.org/10.1162/0034653054638300>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *OECD economic outlook: Indonesia*. OECD.

Rey, H. (2015). Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence. *NBER Working Paper No. 21162*.
<https://doi.org/10.3386/w21162>

Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2008(2), 365–412.
<https://doi.org/10.1353/eca.0.0020>

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025). *President Prabowo supports increased investment to reach Rp3,414 trillion by 2029*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 0(1), 65–94.
<https://doi.org/10.2307/1884513>

Thawley, C. (2024). Towards a higher growth path for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2432035>

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects: Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia country overview and economic prospects*. World Bank.

Catatan: naskah ini siap dikembangkan lebih lanjut. Beberapa sumber resmi seperti BPS, BI, Bappenas, OECD, dan World Bank umumnya tidak memiliki

Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi Politik Pertumbuhan 8 Persen: Ambisi, Risiko, dan Jalan Realistis bagi Indonesia

DOI karena berupa laporan institusional, sedangkan artikel jurnal dan working paper akademik telah dicantumkan dengan DOI.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 6 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a225a06-3f70-83ec-bc5e-1c93a8a5ed2e)). <https://chatgpt.com/c/6a225a06-3f70-83ec-bc5e-1c93a8a5ed2e>